



DEPARTEMEN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BERITA PERDAGANGAN

Berita Perdagangan bersumber dari laporan, artikel, dan informasi berbagai Perwakilan RI di luar negeri maupun Instansi/Dinas Perdagangan di daerah.
Diedit dan diolah kembali oleh
Pusat Humas Departemen Perdagangan

Paket Stimulus Mengantisipasi Dampak Krisis Keuangan di Mesir

Cairo, 16 Pebruari 2009 - Dalam beberapa tahun terakhir, Mesir mencatat pertumbuhan ekonomi yang cukup baik karena didorong oleh reformasi ekonomi yang dijalankan Pemerintah. Pada TA 2007/2008 pertumbuhan GDP meningkat 7,2% dari sebelumnya 7,1% pada TA 2006/2007.

Namun imbas krisis keuangan global rasanya sulit dihindari, gejala tersebut ditandai dengan menurunnya permintaan pasar luar negeri, pendapatan dari sektor pariwisata dan Terusan Suez serta *foreign direct investment* (FDI). Di samping prospek melemahnya permintaan pasar dalam negeri. Gejala kecenderungan tersebut terbaca dari menurunnya pertumbuhan rata-rata menjadi 5,8% pada semester pertama TA 2008/2009 dari sebelumnya 6,5% pada periode yang sama TA 2007/2008. Walaupun demikian, dalam pidato Perdana Menteri Ahmed Nazif pada pertengahan Desember 2008, Pemerintah mencoba realistik dengan menetapkan target pertumbuhan ekonomi minimal 5,5% pada TA 2008/2009

Pemerintah Mesir telah melakukan berbagai upaya menyikapi gejolak krisis ekonomi dan keuangan dunia saat ini di berbagai bidang. Di antaranya strategi yang ditempuh pemerintah pada bulan November 2008, kebijakan paket stimulus ekonomi yang bertujuan dapat membantu mengendalikan ekonomi dalam negeri Mesir di tengah resesi keuangan yang diperkirakan akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Program tersebut berupaya memangkas biaya produksi, meningkatkan ekspor, memacu pasar domestik serta meningkatkan insentif untuk investor asing.

Kebijakan tersebut didorong oleh terbatasnya sumber daya keuangan dan defisit anggaran pertumbuhan. Paket stimulus yang dicanangkan Pemerintah sebesar EGP 15 miliar (USD 2,73 miliar) atau 1,3% dari GDP TA 2008/2009 sebagai anggaran tambahan dari *budget* TA 2008/2009. Menteri Keuangan Boutros-Ghali menyebutkan pembiayaan paket stimulus ini berasal dari dana pengalihan subsidi makananan.

Penyaluran paket tersebut melalui Ministry of Trade & Industry (MTI) yang akan lebih memperhatikan pada proyek infrastruktur berupa pengairan dan transportasi serta subsidi ekspor. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi fasilitas pemicu pengembangan ekonomi di masa mendatang, anggaran tersebut dijadwalkan akan dikururkan pada semester kedua TA 2008/2009.

Kementerian Pertumbuhan Dalam Negeri juga diberi wewenang untuk mendistribusikan anggaran dari paket stimulus tersebut guna peningkatan infrastruktur sebesar EGP 800 juta ke seluruh provinsi Mesir berdasarkan kepadatan penduduk di setiap provinsi dengan asumsi EGP 10 juta per setiap satu juta penduduk.

Dari anggaran yang telah ditetapkan, EGP 12 miliar diantaranya akan digunakan oleh lembaga pemerintah. MTI akan memfokuskan kepada peningkatan investasi di zona industri dan kawasan niaga berkembang di seluruh Mesir. pemerintah menyadari bahwa paket stimulus ini akan menambah defisit APBN (6.6% dari GDP TA 2007/08), namun langkah tersebut dipandang strategis dalam kerangka upaya meminimalisir dampak negatif perlambatan ekonomi secara umum.

Menteri Perdagangan dan Industri Rachid Mohamed Rachid menjelaskan bahwa mempertimbangkan keadaan dan perkembangan ekonomi pasca evaluasi bulan April 2009 maka tetap terbuka kemungkinan pemerintah akan menambah anggaran paket stimulus.

Perencanaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan konsumsi publik dan mendorong perdagangan dalam negeri melalui penyediaan lahan guna pengembangan pasar domestik. MTI mengalokasikan EGP 400 juta mewujudkan strategi tersebut. Di samping itu, MTI juga akan membebaskan jadwal pembayaran tanah industri selama tahun 2009 hingga satu tahun. Pemerintah juga menetapkan harga energi lama (gas alam dan listrik) untuk konsumen industri tidak padat energi tidak berubah hingga akhir tahun 2009.

Sementara kiat yang ditempuh pemerintah untuk menarik investasi luar negeri melalui pembebasan pajak penjualan (untuk barang modal) pada proyek yang dimulai pada tahun 2009. Biaya pembebasan pajak penjualan tersebut diperkirakan sebesar EGP 1 miliar, sedangkan biaya pengurangan *custom duty* pada barang modal akan mengurangi pemasukan pemerintah sebesar EGP 1,2 miliar.

Penurunan tarif bea masuk sejumlah produk yang berkisar dari 2% hingga 5% tersebut meliputi *intermediary goods* untuk industri automotif, komponen AC, bahan dari peralatan rumah tangga, peralatan untuk industri produk susu dan pemrosesan makanan, peralatan untuk *spinning* dan *weaving*, percetakan dan peralatan listrik. Sementara jenis produk yang dikenakan bea masuk lebih dari 30% tidak termasuk dalam paket kebijakan tersebut terutama kendaraan.

Pemerintah Mesir juga mencanangkan UU Listrik baru guna mendorong pertumbuhan *renewable energy* dan sebagai bagian reformasi di sektor ini yang memungkinkan partisipasi swasta. Mesir merencanakan peningkatan kapasitas listriknya hingga 55 gigawatts pada tahun 2027 dari 23 gigawatts saat ini, 90% dari kapasitas tersebut berasal dari *thermal energy station*. Kapasitas yang dimiliki sekarang mampu memenuhi 99% kebutuhan listrik rakyat Mesir. Pemerintah berencana melipatgandakan kapasitas listriknya melalui *renewable energy* hingga 20% pada tahun 2020.

Saat ini sekitar 9,3% sumber daya energi nasional diproduksi secara *hydroelectrically*, Mesir menghasilkan 310 megawatt dari tenaga angin dan 240 megawatt dari tenaga air. Saat ini pemerintah sedang mengembangkan 720 megawatt dari *renewable energy* disamping teknologi *solar-energy* yang diperkirakan akan mampu menyediakan 140 megawatt. Untuk jangka panjang Mesir juga sedang mengembangkan proyek energi nuklir pertama.

Pemerintah telah menghapus pajak ekspor (PE) produk semen, besi dan baja yang diterapkan sebelumnya pada tanggal 29 Maret 2008 sebagai antisipasi meningkatnya

permintaan semen dan besi di luar negeri yang mengakibatkan melonjaknya harga dan keterbatasan stok di pasar domestik.

PE semen sebesar EGP 85 (USD 15,20) per ton, sementara cukai ekspor *billet* baja mencapai EGP 180 per ton. Pemerintah menyampaikan pertimbangan pengenaan PE sebagai kompensasi untuk pemerintah bagi energi murah yang disediakan bagi produsen semen dan besi di Mesir. Produsen semen di Mesir menikmati biaya produksi yang rendah di Mesir hingga berkat tingkat penjualan ke pasar luar negeri yang tinggi maka Mesir menjadi eksportir semen terbesar keenam di dunia.

Perkiraan sementara Bank Sentral Mesir (BSM), FDI pada periode TA 2007/2009 akan meningkat dari USD 11,05 miliar menjadi USD 13,24 miliar. Menteri Investasi Mahmoud Mohieldin menyebutkan langkah pemerintah dalam rangka menggalang investasi asing dengan memberlakukan kembali status *free zone* untuk proyek *refinery* yang pernah dicabut pada Mei 2008 terkait fasilitas industri padat energi.

Mencermati permintaan pasar luar negeri yang akan menurun drastis, pemerintah memperkirakan pertumbuhan tinggi ekspor dalam beberapa tahun terakhir akan semakin berkurang. Pemerintah berkeinginan menjaga volume ekspor yang sama pada tahun sebelumnya. MTI akan menyalurkan EGP 3,5 miliar untuk menjaga ekspor Mesir ke pasar tradisional sebagaimana tetap diupayakan penjangkauan terobosan ke pasar baru.

Pemerintah berupaya keras menjaga industri dan ekonomi dalam negeri dari praktek *dumping* dan penyelundupan, langkah antisipasi perlu disiagakan menyusul dampak resesi global yang terjadi saat ini yang akan mendorong sejumlah negara menjual produknya lebih banyak ke kawasan Timteng.

BSM mengeluarkan regulasi baru yang membebaskan bank-bank Mesir yang menyalurkan pinjaman ke UKM dari kewajiban batas kredit 14% dari nilai cadangan dana bank yang disimpan di Bank Sentral.

Berdasarkan kebijakan baru tersebut, nilai penjualan tahunan UKM diharuskan antara EGP 1 juta hingga 20 juta dan total *paid-in capital* berkisar antara EGP 250.000 hingga EGP 5 juta. Gubernur BSM menyebutkan bahwa regulasi tersebut merupakan bagian dari program reformasi perbankan tahap kedua.

Kementerian Investasi telah mengeluarkan strategi baru untuk meningkatkan investasi UKM yang meliputi penyediaan kawasan khusus untuk pengurusan prosedur investasi yang berkaitan dengan UKM di seluruh pusat-pusat investasi di Cairo dan provinsi lain serta kawasan industri

Pemerintah Mesir akan menghapuskan biaya promosi (retribusi) dari hotel dan perusahaan transportasi wisata ke *tourism promotion authority* dan pengurangan biaya *landing, take-off* dan biaya *ground handling* untuk *charter flight*, biaya tersebut akan dibebaskan seandainya jumlah pendaratan pada satu kota mencapai 11 kali selama tiga bulan.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk membantu dan meringankan beban industri pariwisata dalam menghadapi krisis keuangan global. Kementerian Pariwisata juga akan merubah kampanye dan iklan untuk lebih fokus pada promosi Mesir sebagai daerah tujuan wisata.

Industri Pariwisata Mesir mulai merasakan imbas gejolak krisis keuangan dunia ini dengan menurunnya tingkat pemesanan hotel hingga 30% pada Januari 2009 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Bank Sentral Mesir dalam laporan Desember 2008 menyebutkan bahwa pemasukan dari sektor pariwisata pada triwulan pertama TA 2008/2009 meningkat 15,2 menjadi USD 3,3 miliar. Sektor pariwisata sendiri menyumbangkan 6,6% untuk total GDP Mesir.

(Sumber: Atase Perdagangan KBRI Kairo)

Informasi lebih lanjut, hubungi:

Pusat Hubungan Masyarakat
Departemen Perdagangan
Telp/Fax: 021 – 23528400/23528456